

**PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA  
(TINJAUAN DARI PERSPEKTIF SEJARAH)**

*Sunarso  
Jurusan PKn H FISE UNY*

**Abstra**

*It is sometimes said that education is in the public domain, but what is open to public discussion, such as the purposes of education, is not necessarily publicly held. Every public question is liable to be viewed from many personal standpoints. It is just as likely to be influenced by prejudice and short-sightedness as by impartiality and perceptiveness. What is evident in all public discussions is not so much a merging of viewpoints as a personal slant on things-whether the topic be presidential elections, racism, or the purposes of education.*

*There seems never to be a time when educators are from questions or problems relating to their aims in educating, for most societies view formal education as a vehicle for arriving at some worthwhile destination or as an instrument to be used to shape some desirable and product. But especially today, when the very world in which we live is threatened with destruction, and when the fundamental values and purposes of human forms of association are under serious question, and most especially when formal education itself is squarely faced with the charge of being irrelevant to the lives of those whom it purports to educate, a full scale reassessment of the aims of education by educators and critics of education alike seems to be inevitable.*

Kata kunci: pendidikan, pendidikan prakolonial, pendidikan masa kolonial, pendidikan setelah kemerdekaan.

**A. Pendahuluan**

Sejarah pendidikan telah berlangsung begitu panjang, sepanjang sejarah umat manusia itu sendiri, karena pendidikan dimulai sejak adanya manusia di dunia ini. Menelaah sejarah pendidikan sebenarnya tidak lain adalah mengkaji sejarah manusia dalam rentang waktu masa lalu dalam periode dan tonggak-tonggak peradaban manusia.

Pendidikan yang merupakan proses meniti hamparan kehidupan yang panjang, menempati ruang dan waktu yang membentang sepanjang usia anak didik. Pendidikan berusaha membuat anak menemukan diri, kemampuan, ketrampilan, kecerdasan dan kepribadian secara optimal. Proses pendidikan berjalan melewati sekat formal dan sekat non-formal. Sekat formal berupa lembaga sekolah, dibentuk dengan tujuan memudahkan anak didik menerima beragam jenis perubahan secara terkendali. Satu sisi lagi adalah sekat non-formal, yaitu sekat yang dibentuk orang tua mereka sendiri, dan sekat yang merupakan pertemuan anak didik dengan teman-teman sebaya mereka.

Sangat sulit untuk menentukan kapan tepatnya pendidikan itu mulai ada. Sebab keberadaan pendidikan itu setua kehidupan manusia itu sendiri. Pendidikan telah berlangsung sebelum manusia berbicara, menulis dan membahas tentang arti pendidikan. Sejarah umat manusia dimulai sejak aktivitas masyarakat primitif yang membentuk kebudayaannya. Ribuan tahun lamanya masyarakat primitif itu sendiri telah mengalami tahap-tahap perkembangan atau fase yang dibedakan ke dalam: 1) tahap *oolithik*, ketika manusia hanya hidup berdasarkan apa yang disediakan oleh alam, menggunakan benda-benda di sekitarnya seperti kayu, tulang, karang dan mereka hidup di semak-semak dan gua-gua; 2) tahap *paleolithik*, ketika manusia menggunakan batu sebagai benda tajam, alat-alat sederhana dari batu seperti kapak, palu dan busur tetapi masih kasar 3) tahap *neolithik*, ketika manusia telah menggunakan benda-benda lebih baik dari tahap kedua, lebih halus dan lebih tajam dan telah mampu menciptakan gubuk tempat berlindung dari bahan-bahan yang diambil dari alam sebagaimana ditunjukkan oleh suku Indian Amerika, mereka terlatih membuat rumah, berburu, memancing, pertanian dan seni domestik (Agus Salim, 2007: 189). Pada tahap-tahap itu telah berlangsung pendidikan yang diturunkan dari generasi ke generasi.. Pada masyarakat yang telah lebih maju dapat ditelusuri berbagai peninggalan sejarah yang terkait dengan pendidikan baik dari sisi konsep maupun praktiknya. Dari paparan historis sejarah pendidikan dapat ditarik berbagai konsep dan praktik pendidikan yang khas untuk setiap zaman dan masyarakatnya.

Sejarah pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan Budha pada abad ke-5 Masehi. Akan tetapi sekolah formal baru dimulai pada abad ke-17, ketika pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan sistem pendidikan yang ditujukan untuk mendidik tenaga terampil yang dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka.

Pemahaman yang baik terhadap sejarah pendidikan di Indonesia, diharapkan akan lahir pemikiran-pemikiran baru serta terori-teori baru di bidang pendidikan yang cocok dan sesuai dengan kondisi aktual bangsa. Kita semua sangat merindukan munculnya pemikiran-pemikiran “orisinil” yang tidak hanya bertolak dari teori-teori Barat, melainkan muncul dari pemikiran-pemikiran aktual yang berkembang di bumi Indonesia.

## **B. Pendidikan Sebelum Masa Kolonial**

Sejarah pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan Budha pada abad ke-5 Masehi. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha, pendidikan dipengaruhi ajaran kedua agama tersebut. Demikian pula pada masa awal

Islam masuk ke Nusantara, pendidikan dan pengajaran pun mengalami penyesuaian dengan agama Islam.

Di daerah Kalimantan (Kutai) dan Jawa Barat (Tarumanegara) ditemukan prasasti adanya kebudayaan dan peradaban Hindu tertua. Dari sumber-sumber Cina yang berasal dari zaman Dinasti Tang, diketahui pada masa pemerintahan Ratu Simo (His-mo) di Ho-ling (di Jawa) telah ada seorang pendeta Budha yang terkenal bernama Janabhadra (Yoh-na-po-to-lo). Pendeta ini telah membantu seorang pendeta Cina bernama Hui-ning menerjemahkan kitab suci agama Budha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. (Kunaryo Hadi Kusumo 2007:190).

Seorang pendeta Cina yang lain I Tsing, tinggal beberapa tahun di Sriwijaya. Dalam karyanya yang ditulis tahun 689, ia menyebutkan betapa mashurnya Sriwijaya sebagai pusat agama Budha. I Tsing menyebutkan bahwa di ibukota kerajaan Sriwijaya yang dikelilingi benteng terdapat lebih dari seribu orang pendeta yang belajar agama Budha (Kunaryo Hadi Kusumo 2007:191).

Dalam agama Hindu, kaum Brahmana, adalah kaum ulama. Mereka adalah penyelenggara pendidikan dan pengajaran. Mereka mempelajari dan mengajarkan teologi, sastra, bahasa dan ilmu kemasyarakatan. Juga ilmu-ilmu dalam rumpun eksakta, seperti perbintangan, ilmu pasti, seni bangunan, seni rupa dan ilmu pengetahuan lainnya. Kebudayaan dan sistem pendidikan Hindu di India pada masa itulah yang sangat berpengaruh dan berkembang di Indonesia.

Dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu membaaur dengan unsur-unsur Indonesia asli yang coraknya khas. Sampai kejatuhan kerajaan Hindu terakhir di Indonesia, yaitu Majapahit pada awal abad 16 M, ilmu pengetahuan terus berkembang, khususnya bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata negara dan hukum. Kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kalingga, Mataram, Kediri, Singosari

### **C. Pendidikan Masa Kolonial**

#### **1. Jenis-Jenis Pendidikan Masa Kolonial**

Baru pada abad ke-17 pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan sistem pendidikan yang ditujukan untuk mendidik tenaga terampil yang dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka. Jenis pendidikan yang diselenggarakan meliputi: pendidikan dasar, sekolah latin, pendidikan teologia, akademi pelayaran dan sekolah Cina (Sawa Suryana: 2007:195-197).

##### **a. Pendidikan Dasar**

Sekolah Kristen di Batavia yang bertujuan menyebarkan agama, oleh pemerintah kemudian diganti menjadi sekolah Batavia (*Bataviaashe School*) pada tahun 1617. Namun karena menderita kekurangan murid sekolah ini kemudian ditutup pada tahun 1632. Pada tahun 1630 dibuka sekolah untuk warga masyarakat (*burger School*), yang menempati level pendidikan dasar dengan tujuan untuk mendidik dan mengajarkan budi pekerti.

#### **b. Sekolah Latin (*Latijnsche School*)**

Sekolah ini pertama kali didirikan di Batavia (1642), mengajarkan bahasa Latin bagi pergaulan Eropa. Sekolah diselenggarakan dengan cara tumpang tinggal di rumah seorang pendeta. Sekolah ini sempat berkembang pesat, tetapi kemudian menyusut dan kemudian tutup pada tahun 1651. Sepuluh tahun kemudian, sekolah ini dibuka lagi namun hanya bertahan selama empat tahun sebelum akhirnya ditutup secara permanen.

#### **c. Seminar *Theologicum***

Lembaga pendidikan ini bertujuan menghasilkan pendeta agama Kristen atas perintah VOC. Pendidikan ini memiliki nilai ganda, yaitu mendidik pendeta sekaligus dijadikan guru sekolah. Sekolah yang didirikan pada tahun 1745, bertahan selama sepuluh tahun. Setelah terjadi akumulasi jumlah guru sekolah inipun ditutup dengan alasan penghematan. Materi yang diajarkan adalah bahasa Belanda, bahasa Latin, bahasa Melayu, bahasa Portugis, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani.

#### **d. Akademi Pelayaran (*Academie der Marine*)**

Lembaga ini didirikan dengan tujuan mendidik calon perwira pelayaran untuk 24 pemuda asal Eropa. Mereka mempelajari bahasa Melayu, Malabar dan Persia, mereka belajar bahasa untuk kepentingan navigasi pelayaran internasional. Lembaga ini didirikan tahun 1743 dan ditutup pada tahun 1755, setelah menghasilkan para pelaut untuk kepentingan pelayaran perdagangan di Nusantara, beberapa diantaranya adalah pelaut pribumi.

#### **e. Sekolah Cina**

Sekolah ini diperuntukkan bagi penduduk keturunan Cina yang belum mendapat kesempatan memperoleh pendidikan. Pada tahun 1737 didirikan sekolah untuk masyarakat keturunan Cina dari keluarga miskin. Sekolah ini tidak berfungsi lagi akibat terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemberontakan orang Cina pada tahun 1740. Pada tahun 1753 dan 1787, sekolah semacam ini didirikan kembali atas dukungan masyarakat keturunan Cina. VOC

sebenarnya tidak secara langsung mengelola pendidikan bagi keturunan Cina, melainkan diserahkan kepada masyarakat Cina sendiri melalui lembaga swasta.

## **2. Politik Pendidikan Hindia Belanda**

Pertama, pada tahun 1808 Deandels memerintahkan kepada para bupati di Pulau Jawa agar memperluas jangkauan pengajaran di kalangan rakyat serta mendirikan sekolah di setiap distrik. Perintah itu belum sempat dijalankan karena tiga tahun kemudian pemerintah kolonial jatuh ke tangan Inggris. Perintah ini jelas memberi indikasi kepada masyarakat, bahwa pendidikan dan pengajaran akan dikembangkan secara luas kepada masyarakat, yang selama ini pendidikan hanya dikuasai oleh warga Eropa dan kalangan Kristen.

Kedua, pada tahun 1809 untuk pertama kali diselenggarakan pendidikan bidan, suatu pertanda bahwa pemerintahan Hindia Belanda memiliki kepentingan kepada kesehatan rakyat. Para guru adalah kelompok dokter yang tinggal di Jakarta, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program pendidikan ini.

Ketiga, pada tahun 1809 pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa bangkitnya nasionalisme dapat terjadi dengan penguatan basis kebudayaan tradisional. Oleh karena itu didirikan sekolah yang bertujuan "memajukan tari-tarian rakyat" di Cirebon didirikan sekolah ronggeng yang seluruh pembiayaan menjadi tanggungan Sultan.

Selanjutnya secara empirik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga pendidikan Islam. Menurut laporan pemerintah Hindia Belanda tahun 1831, tentang lembaga pendidikan asli di Jawa tercatat sebanyak 1835 buah lembaga pendidikan Islam dengan jumlah santri 16.556 orang tersebar di seluruh Jawa. Tahun 1885, di Jawa tercatat 14.929 lembaga pendidikan Islam dengan jumlah murid 222.663 murid.

Pada awal abad 20, pemerintah Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan Barat untuk penduduk pribumi. Sebetulnya sekolah model Belanda telah masuk dan berlaku di Indonesia pada abad 17, tetapi terselenggara pertama kali dan diperuntukkan hanya kepada keluarga Belanda yang tinggal di Maluku. Sekolah yang pertama kali berdiri adalah jenis sekolah dasar yang sifatnya masih tertutup untuk golongan pribumi.

Konsep pendidikan Barat tersebut dapat lebih memenuhi kebutuhan untuk mengisi lowongan kerja dalam administrasi modern dengan gaji dan hasil yang lebih baik, maka tidak mengherankan tipe-tipe sekolah ini semakin banyak menarik murid, terutama anak-anak priyayi

dan bangsawan pribumi. Sistem pendidikan Barat yang masuk itu diadakan sebagai pelestarian “status quo”, menjadikan pendidikan sebagai tempat training bagi anak-anak para bangsawan untuk kemudian menjadi kepanjangan dari kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.

### **3. Sistem Pendidikan Zaman kolonial**

Ada beberapa tingkatan pendidikan yang menjadi peluang bagi pengembangan kelompok masyarakat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tingkatan pendidikan itu dimulai dari pendidikan rendah sampai pada tingkatan pendidikan menengah.

#### **a. Pendidikan Rendah**

Pendidikan dari sekolah rendah, diperuntukkan bagi anak-anak Belanda sendiri yang berada di Indonesia. Pendidikan sekolah rendah untuk masyarakat pribumi diselenggarakan dengan sangat terbatas, dan biasanya dilakukan di kota-kota besar.

#### **b. Sekolah Rendah Berbahasa Belanda**

Terdapat beberapa jenis sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah rendah Eropa untuk anak-anak kulit putih. Sekolah ini pertama kali didirikan tahun 1818, dengan masa pendidikan 7 tahun. Kadang sekolah ini juga menerima murid pribumi dari kelas sosial tinggi dan bangsa Timur Asing, seperti Cina, India, Arab. Sekolah Bumi Putera Kelas I. Satuan pendidikan ini terdiri atas dua satuan pendukung, masing-masing Sekolah Cina Belanda berdiri 1908, lama pendidikan 7 tahun dengan bahasa pengantar Belanda. Sekolah Rendah Bumi Putra yang diselenggarakan untuk anak-anak pribumi, baik dari kalangan bangsawan maupun pegawai negeri Belanda. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1914 dengan lama pendidikan 7 tahun.

#### **c. Sekolah Rendah Berbahasa Indonesia dan Daerah**

Satuan pendidikan ini memiliki sekolah-sekolah sbb: (1) Sekolah Bumi Putra Kelas Dua yang diselenggarakan untuk masyarakat pribumi, dengan lama pendidikan 5 tahun. (2) Sekolah Desa, didirikan pertama kali tahun 1907, dengan lama pendidikan 3 tahun. (3) Sekolah Rendah Lanjutan Sekolah Desa, diperuntukkan bagi masyarakat desa dengan masa pendidikan 2 tahun. Pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial pada 1914 di hampir setiap kabupaten di Jawa. Di kalangan masyarakat sekolah ini dikenal dengan sebutan sekolah ongko loro. (4) Sekolah Peralihan. Sekolah ini diselenggarakan untuk memberi kesempatan bagi murid-murid sekolah desa yang ingin meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah ini menggunakan pengantar bahasa Belanda. Lama pendidikan 5 tahun.

#### **d. Sekolah Rendah Khusus bagi Masyarakat Ambon**

Terdapat dua satuan pendidikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat Ambon, masing-masing *Ambonshe School* dan *Ambonshe Soldaten School*. Jenis sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak pribumi keturunan Belanda. Sekolah ini sangat terbatas, di beberapa kota dan disekitar tangsi tentara kolonial, misalnya di kota Magelang, Jakarta, Padang, Semarang dan beberapa daerah lain.

#### **e. Sekolah Rendah Khusus Anak Bangsawan**

Sekolah ini didirikan pertama kali 1865 di Tondano. Dalam perkembangannya sekolah ini dihapus setelah berdiri sekolah bumi putra dan sekolah rendah Eropa. dari upaya untuk mendirikan sekolah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, tampak jelas bahwa pemerintah Belanda sejak awal pendirian sekolah dari jenis sekolah rendah, telah melakukan diskriminasi yang ketat. Kelompok masyarakat Belanda yang ada di Indonesia mendapatkan pelayanan sekolah yang baik, disusul kelompok masyarakat Timur asing, elit sosial pribumi, dan baru kemudian rakyat biasa. Sistem pendidikan yang diciptakan sebagai kebijaksanaan pemerintah kolonial telah menciptakan dan memupuk rasa rendah diri di kalangan golongan pribumi dengan memberi pendidikan yang bermutu rendah. Berangkat dari asumsi ini, pada awalnya tampak bila kaum pribumi tidak memiliki peluang yang baik dalam pendidikan formal. Tradisi berfikir rasional seperti apa yang dilakukan dalam pendidikan modern, belum menjadi tradisi yang jelas di kalangan masyarakat secara luas. Perlakuan diskriminatif ini juga terjadi di tingkat pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi.

#### **f. Pendidikan Menengah**

Pendidikan menengah atau *Meer Ultgebroid Lager Onderwijs* (MULO), adalah sekolah menengah satu-satunya pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Dari nama yang digunakan jelas bahwa sekolah ini merupakan perluasan dari sekolah rendah, yang berarti sekolah lanjutan dari sekolah rendah. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pembelajaran adalah bahasa Belanda. Sekolah ini pertama kali berdiri di Semarang dan Jakarta tahun 1914. Kemudian menyusul di Surabaya, Magelang, Bandung dan Yogyakarta. Selanjutnya di luar Jawa seperti di Palembang, Manado dan Medan. Persyaratan yang dituntut untuk memasuki sekolah menengah ini adalah anak-anak pribumi dan anak-anak Timur Asing terutama keturunan Cina. Lama pendidikan di sekolah ini adalah 3 tahun. Khusus perlakuan terhadap anak-anak keturunan Eropa dan warga asing lainnya kebijakan pemerintah kolonial mendirikan sekolah warga negara asing

yang dikenal dengan sebutan *Hogeen Burger School* atau HBS dan sekolah ini merupakan lanjutan dari sekolah rendah Eropa (*Europese Lager School*). HBS didirikan pertama kali pada tahun 1860, masa pendidikan selama 5 tahun dan menggunakan bahasa pengantar Belanda. Sekolah ini dilaksanakan dalam dua periode waktu, tiga tahun pertama masa pendidikan disebut juga dengan istilah "Gymnasium" dan dalam perkembangannya sekolah ini menjadi 5 tahun, dilaksanakan pertama kali tahun 1867. Sekolah ini dikenal dengan sebutan HBS (*Hoogere Burger School*).

Setingkat lebih tinggi dari sekolah menengah, pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan sekolah menengah umum, yakni *Algemene Middleboor School* (AMS) sebagai kelanjutan dari *Meer Uitgebreid Lager Orderweijis* (MULO). Sekolah ini didirikan pada tahun 1915 menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Sekolah ini memiliki dua jurusan yaitu bagian A adalah jurusan kebudayaan (*Cultur Witenchap*) dan bagian B untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (*Natuur Witenchap*).

Disamping sekolah menengah dan sekolah rendah, di Indonesia juga dikembangkan jenis pendidikan tinggi. Pada tahun 1851, di Jakarta didirikan Sekolah Dokter Jawa yang kemudian pada tahun 1902 beralih nama menjadi *Shole Toot Oplaiding Van Indishe Artsen* atau yang lebih populer dengan nama Stovia (Sawa Suryana: 2007:202-206).

#### **D. Pendidikan Zaman Pergerakan**

Pemerintah kolonial Belanda memiliki kebutuhan akan pengadaan tenaga, baik dibidang administrasi maupun teknik kejuruan. Pemerintah kolonial berusaha memenuhi kebutuhan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Mula-mula mendirikan sekolah rendah, selanjutnya didirikan sekolah menengah dan sekolah tinggi.

Pada masa itu kesempatan mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan hal yang langka, apalagi sekolah dengan sistem Belanda dan memakai pengantar bahasa Belanda. Karena jenis sekolah ini memiliki prospek pengembangan yang cukup cerah. Oleh karena itu sistem penerimaan murid pada tipe sekolah ini didasarkan atas tolok ukur tertentu, antara lain status pegawai orang tua, serta gaji tertentu. Diskriminasi lebih jelas terlihat dalam penerimaan murid di sekolah Eropa. Dalam sudut pandang sosiologis jelas bahwa sistem sekolah yang ada di tanah air, mengandung dualisme di satu pihak dan diskriminasi di pihak lain (Sartono, 1990:76-77).

Di kalangan masyarakat pribumi, penggunaan bahasa Belanda masih terikat adat istiadat, khususnya di kalangan pangreh praja. Akibat sistem pengajaran yang berwajah ganda itu,



masyarakat mengalami stratifikasi, sehingga sulit diharapkan adanya integrasi masyarakat. Lapangan kerja bagi kaum terpelajar pribumi terbatas oleh karena adanya diskriminasi di berbagai bidang pekerjaan, baik itu sektor pemerintah maupun swasta.

Ketidak seimbangan antara jumlah lembaga sekolah dengan permintaan pasar kebutuhan sekolah, diatasi dengan pendirian lembaga-lembaga sekolah swasta, antara lain yang dibuka oleh *Zending*, *Misionaris*, Muhammadiyah, Taman Siswa, Kayu Tanam dan beberapa organisasi lain. Terhadap sekolah semacam itu pemerintah Belanda memberikan pengawasan yang sangat ketat serta melakukan klasifikasi berdasarkan persyaratan tertentu. Ada sekolah yang diberikan subsidi serta ada sekolah yang dipersamakan, dan sekolah yang diakui. Lembaga sekolah lain masuk dalam kategori sekolah liar. Sekolah-sekolah model terakhir ini mempunyai keleluasaan dalam menerima murid, yaitu tidak terlalu ketat dalam menerapkan kriteria yang terbuka untuk mobilitas vertikal golongan pribumi.

Sistem pengajaran kolonial dibagi dalam dua jenis, yaitu (1) pengajaran pendidikan umum; dan (2) pengajaran kejuruan, keduanya dilakukan untuk tingkat menengah ke atas. Sekolah kejuruan yang pertama kali didirikan adalah sekolah guru (*Kweek School*) di Surakarta pada tahun 1852. Disusul sekolah untuk calon pegawai, sekolah calon pegawai pangreh praja pribumi OSVIA (*Opending School Voor Inlansche Ambtenoen*) yang juga dikenal sebagai sekolah sekolah menak atau sekolah raja (1900).

Di akhir abad 19 untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan para medis, didirikan sekolah dokter Jawa yang kemudian dikenal dengan STOVIA. Di beberapa lembaga kedinasan milik pemerintah kolonial, dibutuhkan tenaga spesialis menengah dalam kejuruan tertentu, baik tingkat menengah pertama maupun menengah atas (Sekolah Teknik, Sekolah Pertanian, Sekolah Peternakan Sekolah Kehutanan, Sekolah Dagang dan sekolah Hukum). Sekolah-sekolah itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Perkembangan bidang pengajaran, terjadi pada dua dasa warsa pertama abad ke-20 ketika didirikan Sekolah Tinggi pertama. Pada tahun 1922 didirikan *Technische Hoge School* (THS) di Bandung, menyusul kemudian Sekolah Tinggi Kedokteran *Geneeskundige Hoge School* (GHS) pada tahun 1927 di Jakarta dan Pendidikan Tinggi Hukum disebut *Rechts Hoge School* (RHS) pada tahun 1924 juga di Jakarta. Pada tahun 1941 dibuka *Landbouw Hoge School* dan pada tahun 1940 didirikan *Faculteit der Letteren* di Jakarta juga. Dengan berdirinya banyak perguruan tinggi di tanah air, maka pengajaran diusahakan mengikuti kurikulum yang dikembangkan di negeri

Belanda, sehingga dengan sistem persamaan dapat meneruskan pelajarannya sampai ke negeri Belanda. sehingga pada awal abad ke-20, kemudian banyak dilakukan pengiriman mahasiswa program pascasarjana di negeri Belanda untuk bidang-bidang yang lebih luas. Jenis pendidikan formal lain yang ada di tanah air juga berkembang pesat, dengan didirikannya jenis lembaga pendidikan kejuruan yang cukup beragam (Agus Salim, 2007:208-211).

Perkembangan pendidikan di tanah air pada awal abad 20, menciptakan kelompok kelas menengah baru akibat akumulasi tenaga terdidik dan profesional. Hal ini wajar dalam tataran evolusi sosial pada fase menginjak komersialisasi, industrialisasi, dan birokratisasi. dengan demikian tercipta kelas sosial baru yang tidak mempunyai tempat pada strata tertentu menurut stratifikasi sosial masyarakat tradisional. Kaum terpelajar memasuki posisi terhormat, kaum intelektual kelas menengah baru muncul setelah perguruan tinggi mengeluarkan tamatan yang dengan derajat akademinya tidak masuk birokrasi, tetapi tetap menjalankan profesinya secara swasta. Dari kelompok itulah kemudian muncul pemimpin gerakan nasional.

Pendidikan di zaman pergerakan nasional, sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya nasionalisme di kalangan kaum muda. Berkenaan dengan hal ini beberapa lembaga pendidikan yang lahir pada masa pergerakan, di antaranya Sekolah Kartini (Jepara), Taman Siswa (Yogyakarta), dan Kayu Tanam (Padang). Ada hubungan yang cukup signifikan antara berdirinya Yayasan Pendidikan Taman Siswa dengan tumbuhnya nasionalisme di Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara dengan Taman Siswanya, berhasil menggabungkan teori-teori pendidikan humanis yang sangat modern dengan unsur-unsur tradisional dalam pendidikan di Jawa. Di Sumatera Barat di kota kecil yang bernama Kayu Tanam di perbukitan Singgalang (50 km dari Padang menuju Bukit Tinggi), seorang tokoh pendidikan Mohammad Syafei mendirikan sekolah yang bernama INS (*Indinesische Nederlandsche School*) pada tahun 1926. Sekolah ini mengajarkan bagaimana seorang anak dapat belajar dan bekerja, menciptakan kemandirian sikap hidup dan tidak tergantung pada pemerintah kolonial. Pada masa itu ia telah berusaha untuk menolak sistem pendidikan yang mempersiapkan murid menjadi buruh atau pegawai kantor pemerintah kolonial Belanda.

Setelah lulus dari sekolah Kartini di Jakarta, Mohamad Syafei belajar di sekolah guru di Belanda, ia mengadopsi ajaran Kerschensteiner dan John Dewey yang memiliki landasan kerja bertentangan dengan konsepsi pendidikan kolonial di Indonesia. Inti pengajaran sekolah Kayu Tanam adalah, bahwa anak-anak belajar bekerja, tidak hanya menggunakan akal, tetapi juga

keampilan tangan. Anak harus diajarkan bagaimana memperoleh pekerjaan sesuai dengan pembawaan dan keinginan dalam kehidupan di masa depan. Pendidikan bukan semata-mata urusan akal, tetapi untuk mencapai kepribadian yang selaras. Mohamad Syafei adalah salah satu tokoh pendidikan yang pikirannya cukup matang dan relevan bagi pembangunan pendidikan di Indonesia, bahkan sampai saat ini.

### **E. Pendidikan di Zaman Pendudukan Jepang**

Pendudukan pemerintah militer Jepang di Indonesia sejak 1942-1945 membawa perubahan di berbagai sektor kehidupan. Meskipun perubahan itu tidak banyak, namun kalangan ahli menyatakan bahwa pada masa ini bidang pendidikan telah mengalami perubahan titik pandang yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

Tujuan pendidikan pada awalnya memang merupakan alat propaganda pemerintah Jepang untuk meraih kemenangan dalam perang Asia Timur Raya. Banyak sekolah yang didirikan pemerintah Belanda dibekukan. Pemerintah Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda sebagai pengantar pembelajaran. Sampai taraf tertentu kebijakan ini menguntungkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Namun di sisi lain pemerintah Jepang juga meningkatkan latihan pendidikan jasmani dan mempersingkat waktu sekolah untuk membentuk sukarelawan pribumi dalam rangka perang Asia Timur Raya.

Beberapa jenis sekolah yang berkembang pada zaman penjajahan Jepang, meliputi *koo mumin gakkoo* (sekolah rakyat 6 tahun), *djan sihan gakko* (SGB), dan *kotto sihan gakko* (SGA). Lembaga sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar sangat diminati kaum pribumi, sampai menjelang masa revolusi fisik sekolah tersebut dibanjiri oleh kelompok usia muda terutama di daerah pinggiran kota dan kota-kota kabupaten di Jawa (Agus Salim, 2007: 214).

Pemerintah Jepang secara fisik tidak banyak menambah jumlah sekolah, tetapi perubahan terjadi pada pembalikan asumsi awal yang menyatakan bahwa kemajuan hanya dapat dicapai dengan model rasionalisme Barat karena pola pikir Timur pun memiliki peluang yang sama untuk mengendalikan perubahan. Kemenangan Jepang atas Barat itu kemudian menimbulkan rasa percaya diri di kalangan bangsa-bangsa terjajah untuk menuntut persamaan hak dan kemerdekaan mereka di Asia dan Afrika.

### **F. Pendidikan Setelah Kemerdekaan**

#### **1. Pendidikan di Era Awal Kemerdekaan**

Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan menjadi sarana mobilitas sosial di kalangan masyarakat pribumi. Kelompok masyarakat terdidik yang sudah ada sejak zaman Belanda menjadi kelompok pertama yang menikmati posisi utama dalam struktur masyarakat. Mereka adalah kelompok pegawai pertama pribumi yang mengisi jabatan birokrasi pemerintahan di Indonesia (Agus Salim, 2007:217).

Akumulasi masyarakat terdidik pada masa awal kemerdekaan kemudian menjadi motor penggerak perubahan masyarakat. Pendidikan keagamaan yang tadinya mendominasi corak pendidikan pribumi pada masa sebelum revolusi bersenjata, pada akhirnya pun tampak bergeser ke arah sekuler. Pendidikan pesantren banyak mengalami kendala. Dalam perkembangannya satu persatu jenis pesantren yang diasuh ulama yang kurang kuat kemudian berubah menjelma menjadi pendidikan madrasah yang menerima kurikulum sekolah umum. Lewat saluran politik, para santri menjalin hubungan dengan pemerintah republik yang memungkinkan mereka membangun gedung dengan ruang kelas modern dan asrama untuk para santri. Tetapi model pendidikan pesantren dan madrasah tetap memiliki identitasnya yang lama, yaitu wadah pendidikan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

## **2. Pendidikan Zaman Pemerintahan Soekarno**

Pada masa pemerintahan Soekarno, upaya pembangunan pendidikan dilakukan dengan dukungan berbagai lembaga swasta yang didirikan kelompok masyarakat, partai politik, berbagai aliran ideologi dan agama. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan pada saat itu, karena pihak pemerintah belum mampu menyediakan sarana pendukung untuk membangun pendidikan.

Lembaga pendidikan sekolah di awal tahun 1950 sampai tahun 1960-an, mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan. Banyak tenaga lulusan sekolah yang potensial tidak lagi tertarik menjadi guru. Mereka terjun ke politik dan birokrat yang lebih menjanjikan masa depan. Animo untuk memasuki sekolah guru mulai surut. Sekolah guru hanya diminati keluarga-keluarga dari pedesaan. Jatuhnya nilai mata uang pada saat itu, membuat banyak tenaga pengajar sering mengabaikan pekerjaan utamanya untuk mencari hasil tambahan (Agus Salim, 2007:219).

## **3. Pendidikan di Zaman Kekuasaan Soeharto**

Pada era Orde Baru, pendidikan mengalami perkembangan pesat. Pemerintahan Soeharto melakukan pembangunan nasional, menempatkan pendidikan dalam skala prioritas utama.

Meskipun anggaran untuk sektor pendidikan masih terbatas, tetapi semangat untuk melakukan pemerataan kesempatan pendidikan sangat jelas dilakukan. Banyak proyek fisik dalam bentuk pembangunan gedung sekolah baru lewat Inpres, pengangkatan guru, pemberian fasilitas laboratorium, dan pemberlakuan kurikulum baru memberikan nuansa dalam pembangunan pendidikan di tanah air.

Sekolah guru pada masa ini mendapat prioritas pengembangan. Tetapi sekolah pendidikan guru untuk tingkat dasar dan menengah tidak mendapatkan input yang menggemirakan. Rerata murid SPG dan Mahasiswa IKIP berasal dari keluarga menengah dan miskin pedesaan. Mereka hanya memiliki tingkat kecerdasan rata-rata dan bukan anak-anak terbaik di negeri ini. Anak-anak cerdas dari keluarga menengah atas lebih tertarik untuk bekerja di sektor ekonomi dan konstruksi yang memiliki peluang dan masa depan yang sangat baik di banding bila mereka menjadi guru.

Pemerintah Soeharto telah merepresi tumbunya ideologi lain selain Pancasila, terutama Islam Garis Keras dan Komunisme. Jenis pendidikan pesantren diawasi secara ketat. Departemen agama mengampu tugas untuk sebanyak mungkin mengajak pesantren menerima kurikulum sekuler dalam bentuk madrasah-madrasah yang mereka kelola.

Selama pemerintahan Soeharto, kekuatan pendidikan nasional mengalami pergeseran. Beberapa perubahan antara lain adanya kemerosotan rasa pengabdian di kalangan komunitas pendidikan sebagai akibat berlakunya “proyek pembangunan” yang mengutamakan target fisik. Masyarakat juga semakin dikejutkan oleh masalah-masalah pendidikan yang semakin luas dan membutuhkan perhatian intensif. Masalah-masalah itu seperti, ijazah palsu, perkelaian pelajar, maraknya pecandu narkoba di kalangan pelajar, komersialisasi bimbingan belajar, perguruan tinggi liar, pembajakan soal ujian, dan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia (Agus Salim, 2007:220).

#### **4. Pendidikan di Era Reformasi**

Masa reformasi, masing-masing pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, belum menampilkan kebijakan yang jelas dalam membangun pendidikan di Indonesia. Ketiga pemerintahan terakhir masih melanjutkan kebijakan lama. Dalam satu dasawarsa terakhir, banyak pemilik modal mendirikan sekolah unggulan bagi kalangan menengah atas. Situasi ini memiliki arti positif, tetapi sekaligus mengandung makna negatif dalam perkembangan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Mungkin pada masa mendatang akan tercipta satu lapis masyarakat terdidik, modern, dan profesional yang dapat merespon perkembangan dunia yang semakin kompetitif. Tetapi fenomena itu hanya berarti bagi kelompok masyarakat tertentu, bagi masyarakat yang lebih luas pendidikan masih menjadi barang mahal yang sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia.

pendidikan di era reformasi, diusahakan oleh banyak pemerintah daerah untuk meningkatkan APBD bagi anggaran pendidikan hingga mencapai 20%. Pemerintah pusat juga berusaha meningkatkan anggaran pendidikan, tahun 2009 pemerintah menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan. Masih banyak kebijakan pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh masalah ujian nasional yang masih merupakan indikator berkuasanya birokrasi negara sehingga merniadakan sekolah sebagai kekuatan lokal.

## **G. Pendidikan Islam**

Islam dan lembaga pendidikannya di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan luas, seiring dengan kemunculan Islam sebagai agama. Dalam konteks kehidupan masyarakat Arab, di mana Islam lahir dan berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan sistem pendidikan yang mendukungnya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat pra-Islam di Arab pada dasarnya tidak memiliki sistem pendidikan formal. Pada mulanya Islam tidak membawa sistem pendidikan formal, tetapi merupakan pendekatan informal, yang terkait dengan usaha-usaha dakwah Islamiah.

Pendidikan Islam berlangsung di rumah-rumah para sahabat Nabi yang kemudian disebut “dar-al-arqam. Tetapi seiring perkembangan masyarakat Islam dan pembentukan sistem masyarakat baru, pendidikan Islam kemudian dipusatkan di masjid, yang kemudian secara tradisional direspon dalam bentuk pesantren. Dari sinilah kemudian pendidikan Islam belakangan ini berkembang dalam bentuk madrasah. Banyak orang menyatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di bumi Nusantara (Sugeng Hariyadi 2007: 229).

### **1. Pendidikan Tradisional Pesantren**

Pengertian pesantren merujuk pada penyelenggaraan pendidikan Islam tradisional di pedesaan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia. Lembaga pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki lima elemen dasar, yaitu pondok, masjid, santri, dan pengajaran kitab klasik (kitab kuning) dan adanya kiai. Kelima unsur

itu menentukan pola interaksi lembaga pesantren, kekuatan lembaga ini ditentukan oleh akumulasi kiai dan kemampuannya dalam mengajarkan kitab klasik kepada para santri.

Tujuan pendidikan pesantren adalah bukan untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi mereka menanamkan pengertian, kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan. Cita-cita pendidikan pesantren adalah melatih orang untuk dapat mandiri, tidak tergantung pada kekuasaan kecuali kepada Tuhan. Rintisan pondok pesantren modern dilakukan oleh pesantren Maba'ul Ulum di Surakarta yang memelopori pendidikan Islam modern dengan memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnya. Rintisan ini kemudian diikuti oleh beberapa pesantren lain, dalam hal ini dapat dikemukakan adanya pembaharuan di Pesantren Rejoso Jombang, Magelang dan beberapa pesantren lain. Pondok pesantren gontor Ponorogo berusaha memasukkan sejumlah mata pelajaran umum, dan mendorong para santri untuk menguasai bahasa Inggris dan Arab sekaligus dalam setiap percakapannya.

Setiap pesantren memiliki model pengajaran yang bersifat non klasikal, yaitu sistem pendidikan dengan metode pengajaran “wetonan” dan “sorogan”. Wetonan, merujuk pada situasi pembelajaran yang di dalamnya seorang kiai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak setiap bacaan kiai. Metode sorogan adalah metode bagi santri yang telah pandai. Santri membaca kitab di depan kiai, kesalahan bacaan langsung dikoreksi oleh kiai. Mempertahankan pendidikan pesantren memang kental dengan tradisi-tradisi keagamaan dan inilah ciri khas yang harus dipertahankan, karena disinilah letak kelebihanannya (Sugeng Hariyadi 2007: 229).

## **2. Pendidikan Islam Muhammadiyah**

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terpenting di Indonesia yang lahir sebelum Perang dunia II. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta 18 Nopember 1912 oleh KH Ahmad Dahlan. Dilihat dari keanggotaannya, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bersifat modernis terbesar di dunia, lebih besar dari organisasi modernis di negeri Islam lainnya.

Muhammadiyah menyadari bahwa pendidikan di Indonesia terbelah dua, yaitu pendidikan sekuler yang didirikan Belanda, dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Akibatnya terjadi jurang pemisah yang amat dalam antara golongan yang mendapatkan pendidikan sekuler dan golongan yang mendapatkann pendidikan pesantren. Muhammadiyah berusaha mendirikan berbagai jenis dan tingkat sekolah hampir di seluruh Nusantara, serta tidak memisah-misahkan antara pelajaran agama dengan

pelajaran umum. Data sebelum muktamar ke-41 di Surabaya (1985) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah berjumlah 12.400 buah lebih tersebar di seluruh pelosok tanah air dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi (Sugeng Hariyadi 2007: 235).

Pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi cita-cita dan dari segi teknik. Dari segi cita-cita Muhammadiyah ingin membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia, alim dan memiliki pandangan agama yang luas. Dengan dasar ini diharapkan seorang muslim memahami ilmu keduniaan yang memungkinkannya melahirkan berbagai gagasan. Bersosok intelektual sekaligus ulama atau sering dikenal dengan ulama-intelekt, yang cakap serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah seperti halnya yang telah didirikan oleh Belanda tetapi dengan menambahkan pelajaran agama dalam kurikulumnya.

## **H. Penutup**

Setelah secara selintas memaparkan sejarah pendidikan di Indonesia, dapat direfleksikan hal-hal berikut. Bangsa Indonesia memiliki sistem pendidikan nasional sebagai indikator dari meningkatnya aspirasi pendidikan sejak zaman sebelum kemerdekaan. Kekuatan sistem pendidikan nasional terletak pada kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan pada generasi muda.

Sebelum kemerdekaan, tenaga guru adalah kelompok nasionalis terdidik yang memiliki kesadaran tinggi dan berasal dari kelompok bangsawan atau kelas menengah. Pada masa awal kemerdekaan kaum cendekiawan yang terdidik banyak yang menjadi politisi, mereka memiliki idealisme dan nasionalisme yang tinggi. Pada era Orde Baru kebanyakan mereka masuk sebagai pegawai birokrasi pemerintah, sehingga berangsur-angsur politisi Indonesia semakin kehilangan mutu sumberdaya yang handal.

Mutu guru juga semakin mundur pada zaman orde lama, guru juga mulai memasuki profesi pemerintahan dan perdagangan. Mereka melihat di luar guru mereka masih dibutuhkan masyarakat. Pada zaman orde baru, input guru terdiri warga negara kelas dua. Mereka adalah anak-anak pedesaan yang kurang begitu cemerlang. Mereka adalah anak-anak petani yang masih tetap mempertahankan kedudukan sebagai “kelas menengah PNS”.

Dominasi kekuasaan pemerintah kolonial di bidang pendidikan formal dilanjutkan oleh pemerintah orde lama, orde baru, dan pemerintah reformasi di dalam bentuk kekuasaan



Departemen Pendidikan. Tarik menarik kepentingan pemerintah pusat dan daerah masih terasa pada penguasaan proyek-proyek strategis pendidikan, dan pelaksanaan Ujian Nasional.

Lembaga pendidikan sejak lama terpilah menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan formal yang dikuasai oleh negara (sekolah negeri) dan lembaga pendidikan tradisional yang diselenggarakan oleh masyarakat (dalam bentuk madrasah dan sekolah swasta). Secara historis pihak pemerintah sejak dahulu hanya memperhatikan lembaga pendidikan formal yang diakomodasi oleh pemerintah. Sekolah swasta dan madrasah selalu terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian oleh pemerintah.

Pada era orde baru, sekolah negeri masih mengakomodasi siswa dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Akan tetapi anak-anak yang berasal dari etnis minoritas cenderung mendirikan sekolah sendiri. Politik integrasi dengan membentuk sekolah asimilasi, justru membuat para siswa dari etnis minoritas merasa terasing secara budaya.

Pengaruh kapitalisme dalam pelaksanaan pendidikan nasional semakin kuat. Banyak lembaga pendidikan yang menjilma menjadi *korporate*. Sebagian sekolah swasta menjadi subsistem pengembangan industri kapitalisme internasional. Sebagian besar lembaga pendidikan swasta bertahan untuk melayani kelompok masyarakat bawah. Mutu pendidikan nasional selalu dikembangkan dari keberadaan kurikulum pendidikan nasional, dengan asumsi bahwa peningkatan mutu pendidikan harus diawali dengan perbaikan kurikulum. Kesejahteraan guru mulai diperhatikan seiring dengan kebijakan sertifikasi guru. Program ini nampaknya kurang persiapan, terbukti belum ada koordinasi yang baik antara Depdiknas, Departemen Keuangan dan lembaga legislatif.

## **Daftar Pustaka**

- Agus Salim, 2007. *Pendidikan Zaman Pergerakan*; dalam buku: *Indonesia Belajarlah (Membangun Pendidikan Indonesia)*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Agus Salim, 2007. *Pendidikan Nasional Lintas Waktu dan Kekuasaan*; dalam buku: *Indonesia Belajarlah (Membangun Pendidikan Indonesia)*. Tiara Wacana, Yogyakarta.

- I. Jumhur dan H. Danasaputra, 1976. *Sejarah Pendidikan*. Penerbit CV Ilmu, Bandung.
- Kunaryo Hadi Kusumo, 2007. *Pendidikan Sebelum Masa Kolonial*; dalam buku: *Indonesia Belajarlah (Membangun Pendidikan Indonesia)*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- M. Said, Dahlan, Mansur, 1970. *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. CV Ilmu, Bandung.
- Sawa Suryana, 2007. *Pendidikan Masa Kolonial*; dalam buku: *Indonesia Belajarlah (Membangun Pendidikan di Indonesia)*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dan Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Gramedia, Jakarta.
- Sugeng Hariyadi, 2007. *Pendidikan Islam*; dalam buku: *Indonesia Belajarlah (Membangun Pendidikan di Indonesia)*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Wardiman Djoyonegoro. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Depdikbud, Jakarta.
- Yulius Adi Utomo. 1981. *Sejarah Pendidikan Nasional*. Don Bosco, Semarang.